

Rekening Rakyat Diblokir: Salah Kaprah, Sesat Nalar!

Oleh: Farid Wajdi, Founder Ethics of Care

ADA yang terasa ganjil dalam logika kebijakan publik kita belakangan ini. Seorang warga mengaku rekeningnya yang berisi Rp50 juta mendadak diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bukan karena terbukti terlibat dalam kejahatan, bukan pula karena ada transaksi mencurigakan. Alasannya sederhana—rekening itu dianggap "tidak aktif" selama tiga bulan. Karena uang itu tak bergerak, ia pun dicurigai, dan akhirnya dibekukan.

Ini bukan cerita fiksi, ini potret keganjilan yang kian sering muncul: rakyat biasa yang menyimpan uang halal tiba-tiba harus berhadapan dengan negara yang mencurigai mereka hanya karena memilih diam. Uang yang ditabung dianggap mencurigakan hanya karena tidak berpindah-pindah. Logika yang absurd

■ Bersambung ke Hal 11



Imigrasi RI Cabut Paspor Riza Chalid

Jakarta, MIMBAR - Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mencabut paspor saudagar minyak sekaligus tersangka kasus korupsi minyak mentah, Muhammad Riza Chalid (MRC).

"Betul, paspornya sudah dicabut oleh Imigrasi," tutur Plt Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman kepada wartawan, Rabu (30/7).

Terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Agus Andrianto menyebut pencabutan itu sudah dilakukan lama sejak Kejagung mengajukan pengekangan. "Sejak awal diminta dicekal dan kita koordinasi untuk pencabutan paspor, disepakati untuk dicabut," ucap Agus.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka. Belasan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

■ Bersambung ke Hal 11



PPATK Blokir 31 Juta Rekening Nganggur Nilainya Rp6 Triliun

Jakarta, MIMBAR - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir lebih dari 31 juta rekening nganggur atau sudah tidak digunakan (dormant) selama lebih dari lima tahun.

Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah mengatakan nilai 31 juta rekening tersebut mencapai lebih dari Rp6 triliun.

"Terbanyak dormant adalah 5 tahun ke atas yang

■ Bersambung ke Hal 11

Eks Stafsus Nadiem Bungkam Usai Diperiksa 8 Jam di KPK

Jakarta, MIMBAR - Staf Khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Fiona Handayani bungkam setelah menjalani klarifikasi selama sekitar 8 jam terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud.

Fiona tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.19 WIB. Ia baru selesai dimintai keterangan pada 17.40 WIB.

Fiona memilih tidak berkomentar usai menjalani

■ Bersambung ke Hal 11



Jadwal

Salat

5 SHAFAR 1447 H

Imsak	: 04:54 WIB	Ashar	: 15:57 WIB
Subuh	: 05:04 WIB	Maghrib	: 18:42 WIB
Zuhur	: 12:34 WIB	Isya	: 19:55 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Korupsi Hancurkan Bangsa

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa. Ia bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan perusak keadilan sosial. Dalam pandangan Islam, korupsi bukan hanya kejahatan administratif, melainkan dosa besar yang mendatangkan murka Allah dan azab di akhirat.

Islam memandang jabatan dan kekuasaan sebagai amanah, bukan alat untuk memperkaya diri. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:



■ Bersambung ke Hal 11

Demo Tuntutan Kasus Korupsi Jalan di Sumut Berlanjut

KPK Didesak Periksa Bobby



JAKARTA - Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) kembali menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Mabes POLRI dan Kejaksaan Agung RI, Rabu (30/7/2025). Mereka mendesak ketiga institusi penegak hukum ini tidak menutup mata terhadap aroma busuk korupsi di Sumatera Utara.

! Hari ini, GERBRAK hadir bukan untuk menggertak, tetapi untuk mengingatkan. Supremasi hukum bukanlah barang mewah yang hanya berlaku bagi rakyat kecil. Kami mendesak KPK segera memanggil Gubernur Sumatera Utara untuk diperiksa secara serius terkait OTT yang menyeret Kadis PUPR Sumut. Jika ada kesalahan, tindak! Jika tak bersalah, buktikan dengan transparansi," teriak Ariswan, Koordinator Lapangan dalam orasinya.

Desakan yang sama juga disampaikan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK). Azmi Hadli dalam orasinya menyoal keberanian KPK untuk memanggil Gubernur Sumut. Ia menegaskan, ada hubungan struktural antara Kadis PUPR dengan Gubernur Sumut tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

"Jika pimpinan yang membawahi Kadis PUPR Sumut

■ Bersambung ke Hal 11



Bobby Nasution Tinjau Stadion Utama Sumut Pastikan Siap untuk U-17 Timnas dan PSMS

Deliserdang, MIMBAR - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meninjau fasilitas Stadion Utama Sumut di Sport Centre Sumut, Batangkuis, Deliserdang. Peninjauan ini untuk memastikan Stadion Utama Sumut, siap digunakan untuk event U-17 Timnas dan menjadi home base PSMS.

■ Bersambung ke Hal 11

Rusia 'Digoncang' Erupsi Gunung Api

Rusia, MIMBAR - Gunung api Klyuchevskoy di Semenanjung Kamchatka meletus beberapa jam setelah wilayah di timur Rusia itu digoncang gempa dahsyat magnitudo 8,8 pada Rabu (30/7).

Kantor berita Rusia RIA melaporkan Gunung Klyuchevskoy Sopka merupakan gunung api tertinggi di Eurasia. Kly-

■ Bersambung ke Hal 11



Revitalisasi Lapangan Merdeka Hijau di Permukaan, Mati di Dalam Tanah

Oleh: Ngatirin

JIKA ada yang tampak indah tapi membawa luka, itu adalah wajah baru Lapangan Merdeka. Rumput sintetis, lampu hias, air mancur. Tapi apa yang terjadi di bawah tanah? Apa yang terjadi pada fungsi ekologis kota?

Revitalisasi besar-besaran ini menutup tanah serapan alami di pusat kota Medan dengan lapisan beton, parkir bawah tanah, dan struktur permanen lainnya. Akibatnya, aliran air permukaan tidak meresap, potensi genangan meningkat, dan paru-paru kota semakin sesak.

■ Bersambung ke Hal 11